

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SEKOLAH
DASAR NEGERI GUGUS I KECAMATAN LUBUK ALUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S1)*



**OLEH
ROSNA ULAN SARI
1200240/2012**

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

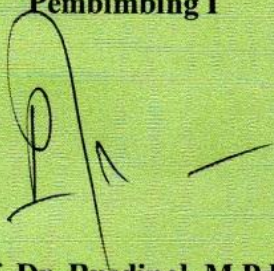
**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SEKOLAH
DASAR NEGERI GUGUS I KECAMATAN LUBUK ALUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Rosna Ulan Sari
NIM : 1200240
Tahun Masuk : 2012
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Juli 2016

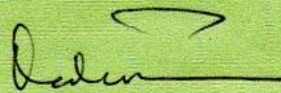
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd
NIP. 19630302 198803 1 002

Pembimbing II



Dr. Hadiyanto, M.Ed
NIP. 19600416 198603 1 004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SEKOLAH
DASAR NEGERI GUGUS I KECAMATAN LUBUK ALUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Rosna Ulan Sari
NIM/BP : 1200240 / 2012
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Juli 2016

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd

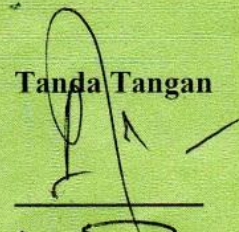
2. Sekretaris : Dr. Hadiyanto, M.Ed

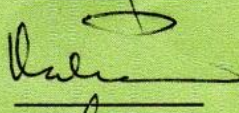
3. Anggota : Dr. Jasrial, M.Pd

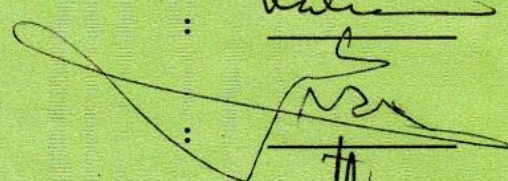
4. Anggota : Dr. Rifma, M.Pd

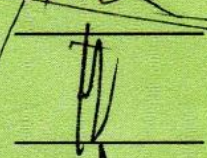
5. Anggota : Dra. Nelfia Adi, M.Pd

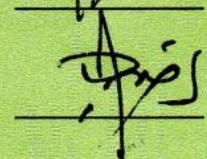
Tanda Tangan











SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, Juli 2016
Yang menyatakan,



ROSNA ULAN SARI
NIM 1200240/2012

ABSTRAK

Judul : Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

Penulis : Rosna Ulan Sari

NIM/BP : 1200240/2012

Jurusan : Administrasi Pendidikan

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd
2. Dr. Hadiyanto, M.Ed

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian untuk mengetahui informasi tentang implementasi Manajemen Berbasis Sekolah khususnya yang terkait dengan manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: 1) Bagaimanakah implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bidang kesiswaan pada Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman 2) Bagaimanakah implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bidang sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman 3) Bagaimanakah implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bidang hubungan sekolah dan masyarakat pada Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman.

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 72 orang. Dengan menggunakan teknik *Total Sampling*. Instrumen penelitian berupa angket dalam bentuk skala *Likert* yang valid dan reliabel. Data diolah dengan menggunakan skor rata-rata (*mean*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bidang kesiswaan pada berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 4,01 (2) implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bidang sarana dan prasarana pada berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 3,90 (3) implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bidang husemas berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3,51. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dapat dikategorikan terlaksana dengan baik dengan skor rata-rata 3,80.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kasih dan anugerah-Nya yang serta menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan tuntunan hidup bagi manusia yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini disusun merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dan semangat dari berbagai pihak tertentu, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis sepantasnya menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd, selaku dosen Penasehat Akademik sekaligus sebagai dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Hadiyanto, M.Ed selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang.
5. Dosen serta karyawan/i FIP UNP yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam mengikuti perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Sekolah dan Guru di SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teristimewa orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Studi S1.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Administrasi Pendidikan 2012 dan seluruh pihak yang telah memberikan dorongan demi penyelesaian skripsi ini.

Penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Robbal Alamin*. Karena tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat dalam penulisan selanjutnya. *Amin Ya Robaal'alam*.

Padang, Juni 2016
Penulis

Rosna Ulan Sari
1200240/2012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Pertanyaan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah.....	9
B. Tujuan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.....	11
C. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah.....	13
D. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	16
1. Implementasi MBS dalam Bidang Kesiswaan.....	24
2. Implementasi MBS dalam Bidang Sarana dan Prasarana.....	30
3. Implementasi MBS dalam Bidang Husemas	35
E. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel Variabel Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
1. Jenis Data.....	42

2. Sumber Data	43
E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	43
1. Instrument	43
2. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Penelitian	47
1. Implementasi MBS dalam Manajemen Kesiswaan	47
2. Implementasi MBS dalam Manajemen Sarana dan Prasarana ...	52
3. Implementasi MBS dalam Manajemen Husemas	59
B. Pembahasan	66
1. Implementasi MBS dalam Manajemen Kesiswaan	66
2. Implementasi MBS dalam Manajemen Sarana dan Prasarana ...	68
3. Implementasi MBS dalam Husemas	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Guru Sampel Penelitian.....	42
2. Skala Kategori Penilaian.....	46
3. Implementasi MBS dalam Manajemen Kesiswaan dari Partisipasi.....	48
4. Implementasi MBS dalam Manajemen Kesiswaan dari Transparansi.....	49
5. Implementasi MBS dalam Manajemen Kesiswaan dari Akuntabilitas.....	50
6. Implementasi MBS dalam Manajemen Kesiswaan dari Otonomi.....	51
7. Rekapitulasi MBS dalam Manajemen Kesiswaan	52
8. Implementasi MBS dalam Manajemen Sarana dan Prasarana dari Partisipasi.....	53
9. Implementasi MBS dalam Manajemen Sarana dan Prasarana dari Transparansi.....	54
10. Implementasi MBS dalam Manajemen Sarana dan Prasarana dari Akuntabilitas.....	56
11. Implementasi MBS dalam Manajemen Sarana dan Prasarana dari Otonomi	57
12. Rekapitulasi dalam Manajemen Sarana dan Prasarana.....	58
13. Implementasi MBS dalam Manajemen Hesemas dari Partisipasi	59
14. Implementasi MBS dalam Manajemen Hesemas dari Transparansi	61
15. Implementasi MBS dalam Manajemen Hesemas dari Akuntabilitas.....	62
16. Implementasi MBS dalam Manajemen Hesemas dari Otonomi.....	64
17. Rekapitulasi MBS dalam Manajemen Husemas.....	65
18. Rekapitulasi MBS	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi-kisi Angket Penelitian	78
2. Pengantar Angket Penelitian	81
3. Petunjuk Pengisian Angket Penelitian	82
4. Angket Penelitian	83
5. Data Mentah Uji Coba Angket Penelitian	87
6. Analisis Hasil Uji Coba Angket Penelitian.....	88
7. Data Mentah Angket Penelitian	95
8. Rho Tabel	97
9. Surat Izin Penelitian	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Dalam peningkatan sumber daya manusia ini, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas tersebut karena peningkatan sumber daya tidak dapat dipisahkan dengan proses peningkatan mutu pendidikan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, maka kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah, hal ini berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengelolaan sistem manajemen pendidikan masih belum sepenuhnya menggunakan sistem desentralistik. Sehingga mengakibatkan hilangnya otonomi kepala sekolah dan guru dalam usaha pengembangan sekolah dan anak didiknya. Untuk itu, maka munculah sistem baru yaitu sistem Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini pertama kali muncul di Amerika Serikat. Latar belakangnya ketika itu masyarakat yang mempertanyakan tentang relevansi dan korelasi pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi dan penataan kembali manajemen sekolah tersebut, dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia diperlukan suatu sistem persekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar (*basic skill*) bagi

siswa. Penataan sekolah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan, diarahkan untuk meredesain dan memodifikasi struktur pemerintah menjadi sekolah yang berkonsep pemberdayaan sekolah. Fokus pemberdayaan tersebut untuk meningkatkan otonomi dan profesionalisme sekolah yang pada gilirannya menjadi kualitas pendidikan. Gagasan MBS tersebut kiranya perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya sekolah, karena implementasi MBS ini tidak sekedar hanya memberikan perubahan kewenangan dalam akademik di sekolah, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam hal kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat (Sagala, 2004:129).

Penyelenggaraan pendidikan nasional sebagai suatu sistem nasional, diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003. Aturan yang berkaitan dengan kewenangan daerah tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2000, selanjutnya dipertegas lagi oleh Undang-undang pemberdayaan daerah yang populer disebut desentralisasi UU dan peraturan ini dijadikan landasan yuridis dalam mengambil kebijakan dan sekaligus merupakan dukungan politik untuk memberdayakan satuan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah. Adanya Undang-undang dan peraturan tersebut dimaksudkan untuk melakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi sehingga muncul perubahan penataan manajemen pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menurut Syamsuddin dalam (Engkoswara dan Komariah, 2011:293) adalah “bahwa MBS merupakan salah satu alternatif pengelolaan sekolah dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan potensi setempat”. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Rusdinal (2007:10) menjelaskan Manajemen Berbasis Sekolah pada hakikatnya adalah pemberian kewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada kepala sekolah dengan melibatkan partisipasi individual, baik personel sekolah maupun anggota masyarakat.

Menurut Danim (2008:15) tujuan Manajemen Berbasis sekolah adalah melakukan perbaikan atas kinerja sekolah yang selama ini dinilai terlalu konservatif. Dengan perbaikan kinerja sekolah, diharapkan mutu hasil belajar siswa dapat meningkat, karena memang peningkatan hasil belajar anak merupakan inti tujuan MBS. Yang terpenting dari adanya MBS adalah pendidikan dapat dikelola secara baik yaitu mencapai kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dengan memberikan kepercayaan kepada sekolah bahwa mereka paling menguasai dan memiliki kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia (Engkoswara dan Komariah, 2011: 294).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki potensi yang besar dalam membentuk kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan

secara profesional. Berdasarkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah, otonomi dan partisipasi masyarakat mempunyai keterlibatan yang tinggi dalam memberikan kerangka dasar untuk peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya otonomi yang besar diberikan kepada sekolah, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola institusinya sehingga sekolah menjadi lebih mandiri.

Namun berdasarkan hasil pengamatan dan observasi penulis di Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada awal Desember – akhir Januari, Manajemen Berbasis Sekolah masih terlihat kurang terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya:

1. Kurangnya pengelolaan dalam penerimaan murid baru. Hal ini terlihat dari adanya murid baru yang diterima padahal usianya belum mencukupi batas yang ditentukan. Selain itu masih diterimanya murid baru walaupun sudah lewat dari batas pendaftaran yang sudah ditentukan.
2. Kurangnya pengelolaan sarana dan prasarana yang dikelola oleh sekolah, sehingga kinerja sekolah dimata masyarakat (*stakeholder*) masih kurang. Hal ini dibuktikan dari adanya sarana dan prasarana yang sudah diinventarisasikan tetapi sekolah tidak menginformasikan kepada *stakeholder*. Sehingga *stakeholder* sekolah tidak mengetahui tentang inventarisasi sarana dan prasarana tersebut.
3. Masih ada beberapa sekolah yang kurang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Hal tersebut dapat

dibuktikan dari sekolah yang hanya mengundang orang tua murid dan masyarakat ketika kenaikan kelas/ kelulusan yang berupa rapat.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Kurangnya pengelolaan dalam penerimaan murid baru dari aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan otonomi.
2. Kurangnya pengelolaan sarana dan prasarana yang dikelola oleh sekolah dari aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan otonomi.
3. Masih ada beberapa sekolah yang kurang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dari aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan otonomi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah serta mengingat begitu luasnya cakupan dari manajemen berbasis sekolah dan melihat adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penelitian ini dibatasi pada tiga komponen manajemen berbasis sekolah, yaitu:

1. Bidang kesiswaan;
2. Bidang sarana dan prasarana;
3. Bidang hubungan sekolah dan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui informasi tentang implementasi Manajemen Berbasis Sekolah khususnya yang terkait dengan:

1. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang Kesiswaan pada Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
2. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang Sarana dan Prasarana pada Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
3. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang Hubungan Sekolah dengan Masyarakat pada Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari batasan dan rumusan masalah tersebut, penulis mengajukan pertanyaan untuk penelitian Implementasi Manajemen Berbasis sekolah di Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Pertanyaannya antara lain yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang Kesiswaan di Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dari segi aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan otonomi?
2. Bagaimanakah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dari segi aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan otonomi?
3. Bagaimanakah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang Hubungan Sekolah dan Masyarakat di Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dari segi aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan otonomi?

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang bersangkutan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, diantaranya yaitu:

1. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam

memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan pendidikan yang berlandaskan pada Manajemen Berbasis Sekolah.

2. Peneliti, untuk memahami serta mempelajari secara khusus tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebagai informasi serta bahan masukan untuk menindaklanjuti Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Salah satu model desentralisasi yang diterapkan dalam manajemen persekolahan adalah *School Based Management* atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). *School Based Management* diharapkan menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan kemampuan dan pemberdayaan kemampuan semua sumber demi tercapainya kemandirian. Pada MBS terkandung nilai prakarsa, kreativitas, pemberdayaan, partisipasi dan kemandirian. Semua ini menjadi nilai pokok bagi tumbuhnya keunggulan sekolah. Bahwa MBS merupakan suatu model desentralisasi dikemukakan Deemer dan Davis dalam (Engkoswara dan Komariah, 2011:293) yakni: *School Based Management* sebagai suatu model desentralisasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan pendidikan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Samani dalam (Marsidin, 2003:86) konsep dasar school based management adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/ Kanwil/ Kandep Dinas ke level sekolah.

Mohrman and Wohlsetter, Calwell and Sprink dalam (Marsidin, 2011: 170) mengemukakan bahwa MBS merupakan sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Sejalan dengan itu Syamsuddin dalam (Engkoswara dan Komariah, 2011:293) menjelaskan bahwa MBS

merupakan salah satu alternatif pengelolaan sekolah dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan potensi setempat.

Menurut Chapman dalam (Sagala, 2004:129) Manajemen Berbasis Sekolah (*school based management*) adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meredesain pengelolaan sekolah, memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki kinerja sekolah yang mencakup pimpinan sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sehingga sekolah lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan sesuai kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat. Desentralisasi sekolah memindahkan otoritas pengambilan keputusan manajemen ke setiap pemerintahan tingkat lokal (*local stakeholder*) sehingga mereka lebih mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kondisi tuntutan masyarakat.

Depdiknas dalam (Rusdinal, 2006:10) mengemukakan Manajemen Berbasis Sekolah pada hakikatnya adalah pemberian kewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan keputusan kepada sekolah dengan melibatkan partisipasi individual, baik personel sekolah maupun anggota masyarakat. Dengan demikian, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah akan membawa perubahan terhadap pola manajemen pendidikan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Artinya, fungsi-fungsi manajemen

sekolah yang semula dikerjakan oleh pemerintah pusat/dinas pendidikan propinsi/dinas pendidikan kota/kabupaten, sebagian dari fungsi itu dapat dilakukan oleh kepala sekolah secara profesional. Selanjutnya menurut pandangan Myers dan Stonehill dalam Umaedi dkk (2011: 43) manajemen berbasis sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan, dan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal, dan kurikulum sekolah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.

B. Tujuan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Secara garis besar tujuan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah adalah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mendayagunakan semua sumber daya yang ada di sekolah dalam membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Seperti yang diungkapkan Mulyasa (2005:25) mengemukakan bahwa tujuan MBS “untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan”. Peningkatan

efisiensi antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.

Senada dengan pendapat tersebut, Danim (2008: 15) mengemukakan bahwa secara teoritis tujuan utama Manajemen Berbasis sekolah adalah melakukan perbaikan atas kinerja sekolah yang selama ini dinilai terlalu konservatif. Dengan perbaikan kinerja sekolah, diharapkan mutu hasil belajar siswa dapat meningkat, karena memang meningkatkan hasil belajar anak merupakan inti tujuan MBS.

Depdiknas (2007:16) mengemukakan tujuan MBS adalah “untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada kepala sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas”. Dengan MBS sekolah diharapkan makin berdaya dalam mengurus dan mengatur sekolahnya dengan tetap berpegang pada koridor-koridor kebijakan pendidikan nasional.

Selanjutnya menurut Sagala (2004:133) lebih spesifik lagi, MBS bertujuan untuk:

1. Menjamin mutu pembelajaran anak didik yang berpijak pada asas pelayanan dan prestasi hasil belajar.
2. Meningkatkan kualitas transfer ilmu pengetahuan dan membangun karakter bangsa yang berbudaya.
3. Meningkatkan mutu sekolah dengan memantapkan pemberdayaan melalui kemandirian, kreativitas, inisiatif, dan inovatif dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya sekolah.
4. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan dengan mengkomodir aspirasi bersama.
5. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah.
6. Meningkatkan kompetensi yang sehat antarsekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan pengelolaan sekolah antar semua unsur yang terkait mengacu pada standar pendidikan nasional.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan MBS adalah untuk mempersiapkan kemandirian sekolah di era desentralisasi pendidikan agar mampu mandiri, luwes, dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan mutu sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dengan tetap berpegang pada koridor kebijakan nasional.

C. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Sagala (2004:136) MBS memiliki karakteristik yang sama dengan sekolah yang efektif, yaitu:

1. Memiliki *output* (prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif) sebagai mana diharapkan;
2. Efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi;

3. Peran kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, menyalurkan semua sumber daya pendidikan yang tersedia;
4. Lingkungan dan iklim belajar yang aman, tertib dan nyaman (*enjoyable learning*) sehingga manajemen sekolah lebih efektif;
5. Analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja dan imbal jasa tenaga kependidikan dan guru sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik;
6. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada publik terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan;
7. Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang sepatutnya dilakukan oleh sekolah.

Lebih lanjut karakteristik tersebut dijelaskan oleh Depdiknas (2007:16)

sebagai berikut:

1. Input pendidikan

Komponen input terdiri dari tiga jenis, yaitu Raw input (masukan mentah dan dasar), instrument input (masukan instrument/alat), dan environmental input (masukan lingkungan). Masukan input bagi pendidikan adalah siswa-siswa dengan segala karakteristiknya seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisik-biologis, bakat, intelegensi baik pada bidang kognitif (IQ), maupun pada bidang afektif/emosi (EQ), minat, motivasi, latar belakang sosial ekonomi dan budaya, bahkan kebiasaan, cara dan gaya belajarnya. Instrumental input meliputi kurikulum, guru, kepala sekolah, pegawai, sarana dan prasarana pendidikan, strategi dan metode, dana, waktu, belajar, dan organisasi sekolah. Enviromental input meliputi partisipasi orang tua, instansi terkait terutama para *stakeholders* (pembina) pendidikan dan masyarakat.

2. Proses

Komponen proses ini tidak lain adalah proses pendidikan. Proses pendidikan menyangkut bagaimana mengelola dan menginteraksikan Raw-input, instrumental input dan Enviromental input secara efektif dan efisien sehingga output (lulusan) dari suatu lembaga pendidikan memiliki ragam dan tingkat pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang sesuai dengan yang dirumuskan dalam tujuan-tujuan pendidikan. Yang dimaksud komponen proses ini adalah pembelajaran. Pembelajaran mempunyai sejumlah komponen yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran dan evaluasi. Pembelajaran ini harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan kualitatif (peningkatan) tingkah laku siswa dari sebelum memasuki situasi pembelajaran dan kualitas tingkah laku siswa yang lebih baik setelah mereka memasukinya. Keberhasilan pembelajaran ini banyak ditentukan oleh seberapa jauh efektivitas dan efisiensi manajemennya.

3. Output yang diharapkan

Sekolah memiliki output yang diharapkan, output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik (*academic achievement*) dan prestasi berupa non-akademik (*non achievement*). Output prestasi akademik misalnya nilai UAN, lomba karya ilmiah remaja, cara-cara berfikir (kritis, kreatif, nalar, rasional, induktif, deduktif dan ilmiah).

Output non-akademik, keingintahuan yang tinggi, harga diri, akhlak/budi pekerti, perilaku sosial yang baik dan kepramukaan.

D. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kemampuan dan kebutuhan sekolah. MBS menawarkan kepada sekolah untuk dapat menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi para siswa. Peningkatan kualitas pendidikan dicapai melalui tata kelola penerapan MBS yang baik. Menurut Depdiknas (2007:45) tata kelola manajemen berbasis sekolah yang baik meliputi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas”.

a. Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu rasionalitas penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk membuat kebijakan/keputusan menjadi lebih dekat dengan *stakeholders* sehingga hasilnya benar-benar merupakan aspirasi *stakeholders*. Untuk itu manajemen berbasis sekolah mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari semua pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*stakeholders*), baik warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, siswa dan tenaga kependidikan lainnya, maupun warga diluar sekolah seperti orang tua siswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang mewakili masyarakat. Partisipasi sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan keputusan sekolah benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders* sekolah. Saat ini, komite sekolah

secara langsung maupun tidak langsung dalam kerangka pengembangan sekolah.

Menurut Depdiknas (2007:46) adalah proses dimana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian pendidikan sekolah.

Partisipasi diharapkan dapat mendorong warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk menggunakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian yang menyangkut kepentingan sekolah, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan utama peningkatan partisipasi menurut Depdiknas (2007: 46) adalah untuk:

1. Meningkatkan dedikasi/kontribusi *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah baik dalam bentuk jasa (pemikiran/intelektualitas, keterampilan) moral, finansial, dan material/barang.
2. Memberdayakan kemampuan yang ada pada *stakeholders* bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan pendidikan nasional.
3. Meningkatkan peran *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai *advisor, supporter, mediator, controller, resource linker and education provider*.
4. Menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders* sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Menurut Depdiknas (2007:48) peningkatan *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Kontribusi/dedikasi *stakeholders* meningkat dalam hal jasa (pemikiran, keterampilan), finansial, moral, dan material/barang.
2. Meningkatnya kepercayaan *stakeholders* kepada sekolah, terutama menyangkut kewajiban dan kebersihan.
3. Meningkatnya tanggung jawab *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan untuk peningkatan mutu pendidikan.
5. Meningkatnya kepedulian *stakeholders* terhadap setiap langkah yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu.
6. Keputusan-keputusan yang dibuat sekolah benar-benar mengekspresikan aspirasi dan pendapat *stakeholders* dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat atau *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

b. Transparansi

Pengembangan transparansi sangat diperlukan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah. Dengan transparansi yang tinggi, publik tidak lagi curiga terhadap sekolah dan karenanya keyakinan dan kepercayaan publik terhadap sekolah juga tinggi.

Menurut Depdiknas (2007:48) transparansi sekolah adalah “keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan di sekolah”. Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang dilaporkan mencerminkan realitas. Jika terdapat perubahan suatu data dalam laporan

suatu sekolah, transparansi penuh mensyaratkan bahwa perubahan itu harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*).

Pengembangan transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui penyediaan informasi yang akurat.

Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami sekolah dan dengan demikian mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkat transparansi sekolah terhadap publik antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi melalui temu wicara maupun tidak langsung melalui media tertulis (brosur maupun pengumuman melalui surat kabar) maupun media elektronik (radio dan tv).

Menurut Depdiknas (2007:49) Upaya lain yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan transparansi adalah “menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi dan prosedur, pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik”.

Sekolah perlu menjamin hak publik, untuk mendapatkan informasi sekolah, fasilitas data base, sarana informasi dan komunikasi, dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di sekolah maupun prosedur pengaduan.

Menurut Depdiknas (2007:50) keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu:

1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah bersih dan wibawa;
2. Meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan sekolah;
3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah;
4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpullkan bahwa transparansi dapat dikatakan sebagai kondisi dimana sekolah memberikan hak-hak serta menginformasikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan oleh warga sekolah, yaitu: guru, siswa, tata usaha, komite sekolah, orang tua dan masyarakat.

c. Akuntabilitas

Manajemen berbasis sekolah yang lebih besar kepada penyelenggaraan sekolah yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sekolah, mengambil keputusan, mengelola, memimpin dan mengontrol sekolah. Agar penyelenggaraan sekolah tidak sewenang-wenang dalam menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus bertanggung jawab kepada publik tentang apa yang dikerjakan sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan oleh publik/masyarakat. Ini berarti, akuntabilitas

publik akan menyangkut hak publik untuk memperoleh pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah. Publik sebagai pemberi mandat dapat memberi penilaian terhadap penyelenggaraan sekolah apakah pelaksanaan mandat dapat dilakukan secara memuaskan atau tidak. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, publik mempunyai hak diinformasikan, hak untuk komplain dan hak untuk menilai kerja sekolah.

Menurut Depdiknas (2007:51) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban penyelenggara sekolah merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada publik/*stakeholders*. Akuntabilitas kinerja sekolah adalah perwujudan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Depdiknas (2007:51) akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban penyelenggara sekolah yang diwujudkan melalui transparansi dengan cara menyebarluaskan informasi dalam hal: (a) pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, (b) anggaran pendapatan dan belanja sekolah, (c) pengelolaan sumber daya pendidikan

di sekolah, dan (d) keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan sekolah dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Depdiknas (2007:51) dilihat dari jenisnya akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Akuntabilitas kebijakan yaitu akuntabilitas pilihan atas kebijakan yang akan dilaksanakan;
2. Akuntabilitas kinerja (*product/quality accountability*), yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah;
3. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan proses, prosedur, aturan main, ketentuan, pedoman, dan sebagainya; dan
4. Akuntabilitas keuangan (kejujuran) yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran uang (*cash in and cash out*).

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah baik dan terpercaya. Penyelenggaraan sekolah harus memahamkan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidik, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Menurut Depdiknas (2007:53) keberhasilan akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah;
2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan disekolah;

3. Berkurangnya kasus-kasus KKN di sekolah; dan
4. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat.

Pelaksanaan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi MBS sekolah dapat dilihat dari aspek yang harus dikelola dalam MBS itu sendiri. Untuk mengimplementasikan MBS secara efektif dan efisien, kepala sekolah dan guru serta pihak yang terkait harus bisa bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS. Selain itu kepala sekolah dan guru juga harus bisa mengkomunikasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendidikan di sekolah.

d. Otonomi

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- 2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi transparan.
- 3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Merujuk dari UU diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi merupakan salah satu prinsip dalam manajemen berbasis sekolah. Otonomi menurut KBBI adalah daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari aspek-aspek diatas akan ditinjau kedalam perangkat atau komponen implementasi MBS. Dimana komponen atau perangkat implementasi MBS diantaranya:

1. Implementasi Manajemen Bebas Sekolah dalam bidang Kesiswaan

Menurut Suparlan (2013:68) berkenaan Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah (RKS/M), Permendiknas No. 19 Tahun 2007 telah memberikan acuan baik dalam aspek umum maupun dalam berbagai aspek khusus sebagai berikut:

- a. Kegiatan sekolah/madrasah dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.
- b. Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- c. Kepala sekolah/madrasah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang nonakademik pada rapat komite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

Terkait dengan pelaksanaan Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah dalam Bidang Kesiswaan, pemerintah telah mengatur beberapa hal sebagai berikut:

a. Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi:

1) Kriteria calon peserta didik:

- a) SD/MI berusia sekurangkurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dan pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog;
- b) SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik dan sosial;
- c) SMP/MTs berasal dari lulusan SD, MI, Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat.
- d) SMA/SMK, MA/MAK berasal dan anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/Mts, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

2) Penerimaan peserta didik/madrasah dilakukan:

- a) Secara objektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah;

- b) Tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi Sd/MI, SMP/MTs, penerima subsidi, dan pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c) Berdasarkan kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK, MA/MAK, dan kriteria tambahan bagi SMK/MAK;
 - d) Sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah.
- 3) Sekolah/Madrasah:
- a) Memberikan layanan konseling kepada peserta didik;
 - b) Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik;
 - c) Melakukan pembinaan prestasi unggulan:
 - d) Melakukan pelacakan terhadap alumni.
- 4) Penetapan Syarat Calon Peserta Didik

Menurut Hadiyanto (2014 :39) persyaratan- persyaratan yang secara umum dituntut apabila seseorang calon peserta didik akan memasuki lembaga pendidikan adalah:

a) Persyaratan Umur

Untuk Sekolah Dasar misalnya, Dirjen Dikdasmen telah menetapkan persyaratan umur calon peserta didik Sekolah Dasar, yaitu sebagai berikut:

- (1) Calon peserta didik telah berumur 7 tahun

(2) Bila semua peserta didik yang berumur 7 tahun telah mendaftar, maka prioritas penerimaan diurutkan sebagai berikut:

- (a) peserta didik yang berusia 8 tahun
- (b) peserta didik yang berusia 9 tahun
- (c) peserta didik yang berusia 10 tahun
- (d) peserta didik yang berusia 11 tahun
- (e) peserta didik yang berusia 12 tahun, dan
- (f) peserta didik yang berusia 6 tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar disebutkan bahwa peserta didik yang diterima di sekolah dasar adalah mereka yang sekurang-kurangnya berusia 6 tahun.

- b) Persyaratan akademik atau pendidikan, misalnya untuk masuk SMA/Sederajat adalah lulusan SMP/atau yang sederajat.
- c) Persyaratan kelakuan, misalnya tidak pernah terlibat dengan kenakalan remaja.
- d) Persyaratan kesehatan.
- e) Persyaratan keuangan.
- f) Persyaratan rayon, di mana sekolah menerima sebagian besar (90%) calon peserta didik yang masih dalam rayonnya

Beberapa persyaratan di atas, biasanya harus dibuktikan dengan persyaratan yang bersifat administratif, dalam wujud:

- a) Surat Keterangan/Akta Kelahiran.
- b) Surat Tanda Tamat Belajar atau Nilai Ujian Nasional, disertai salinan rapor kelas tertinggi dan kelas terakhir.
- c) Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter.
- d) Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Sekolah atau dari Kepolisian.
- e) Mengisi Formulir Pendaftaran.
- f) Pas Photo.
- g) Membayar uang pendaftaran.

Disamping beberapa persyaratan diatas, kadang-kadang di lembaga pendidikan tertentu menambahkan persyaratan khusus, misalnya:

- a) di AKABRI ada persyaratan harus laki-laki, dan tinggi badan mencukupi.
- b) di Sekolah Pelayaran, atau Jurusan Seni Rupa ada persyaratan tidak buta warna.

Menurut Mulyasa (2012:45) manajemen kesiswaan atau manajemen kemuridan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

Menurut Mulyasa (2012:46) Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Menurut Mulyasa (2012:46) penerimaan siswa baru perlu dikelola sedemikian rupa mulai perencanaan penentuan daya tampung sekolah atau jumlah siswa baru yang akan diterima, yaitu dengan mengurangi daya tampung dengan jumlah anak yang tinggal kelas atau mengulang. Kegiatan penerimaan siswa baru biasanya dikelola oleh panitia penerimaan siswa baru (PSB) atau panitia penerimaan murid baru (PMB). Dalam kegiatan ini kepala sekolah membentuk panitia atau menunjuk beberapa orang guru untuk bertanggung jawab dalam tugas tersebut. Setelah para siswa diterima lalu dilakukan pengelompokan dan orientasi sehingga secara fisik, mental dan emosional siap untuk mengikuti pendidikan di sekolah.

Keberhasilan, kemajuan dan prestasi belajar para siswa memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya dan memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengontrol keberhasilan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi belajar sekolah sebagai manajer

pendidikan di sekolahnya. Kemajuan belajar siswa ini secara periodic harus dilaporkan kepada orang tua, sebagai masukan untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya belajar, baik di rumah maupun di sekolah (Mulyasa, 2012:47).

Menurut Mulyasa (2012:47) tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional, di samping keterampilan-keterampilan lain. sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, ,aupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan data yang lengkap tentang peserta didik. Untuk itu, di sekolah perlu dilakukan pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan, dalam bentuk buku induk, buku klepper, buku laporan keadaan siswa, buku presensi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, buku mutasi dan sebagainya.

2. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang Sarana dan Prasarana

a. Pengertian Sarana dan Prasarana dalam MBS

Menurut Mulyasa (2004:49) sarana pendidikan yaitu:

Peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan

atau pengajaran seperti: halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pembelajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut sarana pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana disekolah dengan berpedoman pada prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

- 1) Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan.
- 2) Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dan mendukung proses pendidikan.
- 3) Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat sekolah.
- 4) Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat.
- 5) Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.

b. Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam MBS

Sarana dan prasarana pendidikan sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, berdasarkan pendapat dari Marsidin (2011:270) sarana dan prasarana harus dikelola oleh kepala sekolah dengan cara sebagai berikut: (1) menentukan kebutuhan akan fasilitas fisik sekolah, dan berbagai sumber yang dapat dikerahkan

untuk memenuhi kebutuhan tersebut berdasarkan kebutuhan belajar siswa; (2) menyusun perencanaan dan pengembangan fasilitas fisik sekolah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa secara komprehensif; (3) menyusun program pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas fisik sekolah secara efisien dan efektif; (4) mengatur transportasi sekolah; (5) mengelola asrama dan masjid secara efisien serta pemanfaatan asrama dan masjid tersebut dalam penunjang proses belajar dan mengajar, khususnya untuk pendidikan kerohanian dan kesiswaan.

Menurut Depdiknas (2013:46) manajemen sarana prasarana meliputi aktivitas perencanaan atau analisis kebutuhan, pengadaan, dan pengawasan.

1) Perencanaan/Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Mustari (2014:123) mengemukakan perencanaan pengadaan perlengkapan disekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman yang diprogramkan disekolah. Oleh karena itu sekolah harus bersedia:

- a) Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja atau masyarakat yang terlibat untuk menginventarisasikan kekurangan perlengkapan sekolah.
- b) Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu.

- c) Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya.
- d) Memadukan rencana kebutuhan dengan dana dan anggaran sekolah yang tersedia.
- e) Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia dengan melihat skala prioritas mengenai perlengkapan yang paling penting.
- f) Penetapan rencana pengadaan akhir.

Perencanaan merupakan kegiatan analisis kebutuhan terhadap segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama kegiatan sekolah berlangsung. Menurut Mustari (2014:124) prosedur perencanaan sarana prasarana yaitu: (a) mengadakan analisis materi dan alat media yang dibutuhkan; (b) seleksi terhadap alat yang masih dapat dimanfaatkan; (c) mencari dan menetapkan dana; (d) menunjuk seseorang yang akan diserahkan untuk mengadakan alat dengan pertimbangan keahlian dan kejujuran.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara membeli, menyumbang,

hibah, dan lain-lain. pengadaan sarana dan prasarana dapat berbentuk pengadaan buku, alat, perabot, dan bangunan.

Sistem pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a) Dropping dari pemerintah, hal ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Bantuan ini sifatnya terbatas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana disekolah tetap harus mengusahakan dengan cara lain.
- b) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli, baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu.
- c) Meminta sumbangan pada wali murid atau mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana sekolah ke lembaga sosial yang tidak mengikat.
- d) Pengadaan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam.
- e) Pengadaan perlengkapan sekolah dengan cara tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, indah sehingga menciptakan kondisi sekolah yang menyenangkan dan ASRI bagi guru maupun siswa berada di sekolah. Disamping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat dan fasilitas yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan

relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran baik bagi guru sebagai pengajar maupun bagi siswa sebagai pelajar dalam kegiatan intra sekolah dan ekstra sekolah kapan saja.

3) Pengawasan Sarana dan Prasana Sekolah

Penggunaan barang-barang sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan cara membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang diajukan oleh pimpinan dan diinformasikan kepada masyarakat (*stakeholders*). Dalam rangka memperkuat tanggungjawab diperlukan sebuah pengawasan. Sesuai dengan yang dikemukakan Gunawan (2002:152) pengawasan merupakan suatu hal mutlak dalam manajemen sarana pembelajaran tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan salah satu sarana yang berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk itu sekolah berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan serta keadaan masyarakat. Sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, tuntutan masyarakat, terutama

terhadap sekolah. Dengan kata lain, sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Suparlan (2013:88) mengemukakan dalam bidang peran serta masyarakat dan kemitraaan sekolah, pemerintah telah memberikan rambu-rambu standar pengelolaan sebagai berikut.

- a. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan.
- b. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.
- c. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan nonakademik.
- d. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan, dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.
- e. Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan *input*, proses, output dan pemanfaatan lulusan.
- f. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah.
- g. Kemitraan SD atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP atau yang setara, serta dengan TK atau yang setara dilingkungannya.
- h. Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, dengan dunia usaha dan industri.

- i. Kemitraan SMA atau setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi atau yang setara serta dunia usaha dan dunia industri dilingkungannya.
- j. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

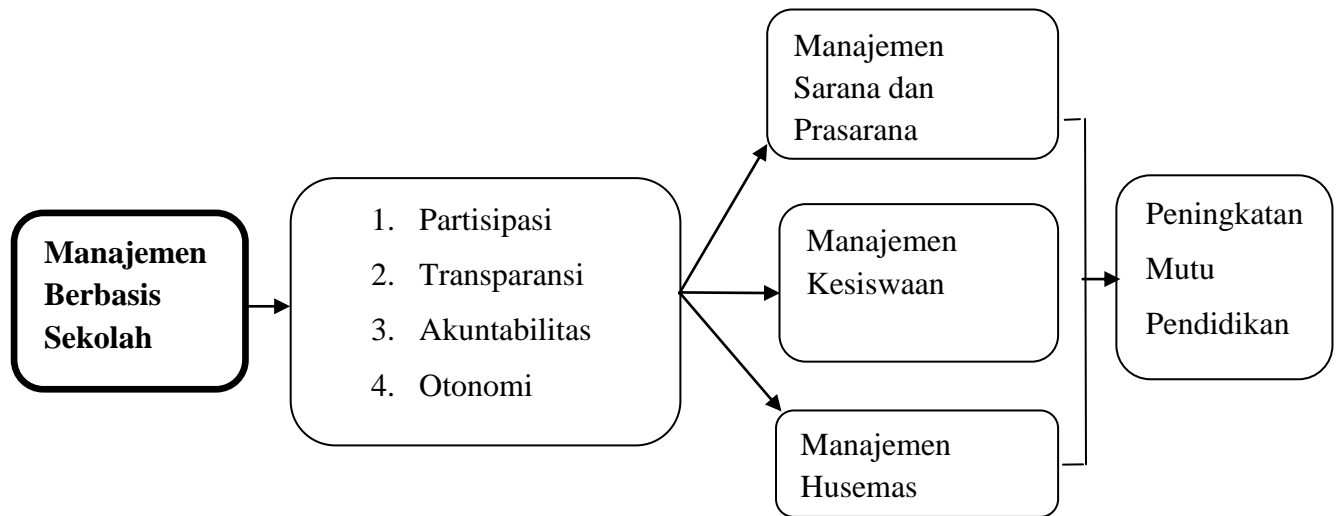
Menurut Mulyasa (2004:50) hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain: (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, (2) memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat ini akan semakin penting pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak.

Pada konsep manajemen berbasis sekolah, manajemen hubungan sekolah dengan orang tua wali murid diharapkan berjalan dengan baik. Hubungan yang harmonis membuat masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memajukan sekolah. Penciptaan hubungan dan kerja sama yang harmonis, apabila masyarakat mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah. Gambaran yang jelas dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, penjelasan dari staf sekolah dan laporan tahunan sekolah. Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapainya tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksanakan secara produktif,

efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas akan terlihat dari penguasaan/kompetensi murid tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dijadikan bekal ketika terjun di tengah-tengah masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk reformasi pendidikan dengan berprinsip sekolah memperoleh kewajiban, wewenang dan tanggung jawab yang tinggi dalam meningkatkan kinerja terhadap setiap *stakeholders*. Meningkatkan pemerataan dan persamaan kualitas dan persamaan bagi semua siswa yang didasarkan atas kebutuhan peserta didik dan juga masyarakat lingkungannya. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dapat dilihat dari beberapa bidang yaitu: dalam pelaksanaan bidang sarana dan prasarana, pelaksanaan bidang kesiswaan dan pelaksanaan bidang hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen berbasis sekolah pada SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam bidang kesiswaan terlaksana dengan baik (4,01).
2. Implementasi manajemen berbasis sekolah pada SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam bidang sarana dan prasarana terlaksana dengan baik (3,90).
3. Implementasi manajemen berbasis sekolah pada SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat terlaksana dengan cukup baik (3,51). Oleh sebab itu perlu kiranya bagi pihak sekolah untuk lebih meningkatkan lagi hubungan sekolah dengan masyarakat.
4. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Gugus I Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dapat dikategorikan terlaksana dengan baik (3,80)

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Bidang Husemas. Karena secara umum hasil penelitian menunjukkan skor rata-rata pada kategori cukup baik. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan agar Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada Bidang Husemas berada pada kategori baik.
2. Bagi Dinas pendidikan agar lebih banyak memberikan arahan serta penyuluhan kepada pihak sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto , Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2012. *Visi Baru Manemen Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2007. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta.
- Engkoswara dan Aan Komariah. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Gunawan , Ary . 2002. *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadiyanto. 2014. *Manajemen Peserta Didik Bernuansa Pendidikan Karakter*. Padang: UNP PRESS.
- Marsidin, Sufyarma. 2000. *Kapita Selekta Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- _____. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Sistem Pendidikan INS Kayutanam*. Padang: UNP PRESS.
- Mulyasa. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Mohamad. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan pemerintah Provinsi sebagai Pemerintah Otonom*.
- Rusdinal. 2006. *Memetik Beberapa Pelajaran dari Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Padang: UNP PRESS.
- Sagala, Syaiful. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: PT Rakasta Samasta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Sukardi. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparlan. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.